

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan obyek Pariwisata di Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 dalam pengelolaan obyek pariwisata kalibiru dan obyek pariwisata hutan mangrove dapat dikategorikan bagus dan efektif. Karena masyarakat terlibat dalam bentuk partisipasi nyata (berwujud) dan partisipasi tidak nyata (Abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata berupa uang, harta benda, tenaga dan keterampilan, sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata berupa partisipasi buah pikiran dan partisipasi sosial.

2. Faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan obyek Pariwisata di Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 pertama yaitu faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam pengelolaan obyek pariwisata yaitu adanya pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo dan adanya paguyuban atau organisasi kepariwisataan.

Kemudian faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan obyek pariwisata di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 yaitu kurangnya dana, sumber daya tenaga-tenaga muda yang

belum memadai, kurangnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dalam pengembangan destinasi pariwisata dan aksesibilitas.

Saran

1. Masyarakat Desa wisata harus sering berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo untuk terlaksananya sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah berdasarkan Ripparda sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 4 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025. Dengan begitu dapat meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dalam pengembangan destinasi pariwisata.
2. Dalam pembangunan kepariwisataan Daerah peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo juga dibutuhkan. Pemerintah Daerah harus dapat menyelesaikan dan memberikan solusi bagi desa wisata yang sedang memiliki kendala, dengan begitu pembangunan kepariwisataan Daerah dapat terwujud sesuai harapan masyarakat.